

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA
DALAM KETENTUAN PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN *jo* PP NOMOR
21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19**

Oleh

Windy Ardianti May, NIM 1714101017

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan sanksi pidana dalam penerapan PSBB menurut PP Nomor 21 Tahun 2020 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (2) faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam terlaksananya sanksi pidana terhadap pelanggaran PSBB berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang sanksi pidana dalam penerapan PSBB dalam penanganan Covid-19. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Sanksi Pidana dalam Ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus bagi pelanggar PSBB, yang termuat hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama. Mengingat makna dari PSBB dan Keekarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda. (2) Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran POLRI dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya himbuan kepada masyarakat, tetapi sebagai strategis komunikasi sosial yang efektif sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, PSBB, Karantina Kesehatan, Penegakan hukum

**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS
IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 60 OF LAW NUMBER 6 OF 2018
JUNCTO PP NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING
SCALE OF SOCIAL RESTRICTIONS
IN THE CONTROL OF HANDLING COVID-19**

By

Windy Ardianti May, NIM 1714101017

Study Program Law Science

ABSTRACT

This research aims to find out (1) the regulation of criminal sanctions in implementing PSBB according to Government Regulation Number 21 of 2020 associated with Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine (2) what factors become obstacles in the implementation of criminal sanctions for violations of PSBB based on Government Regulation Number 21 of 2020. The type of research used is normative legal research, with the type of approach to legislation, conceptual approach and case approach. The source of the legal material used is the specific rules governing criminal sanctions in the application of the PSBB in handling Covid-19. The technique of collecting legal materials is carried out by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss Criminal Sanctions in Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Covid-19. The results of the study show that (1) Law Number 6 of 2018 also does not contain specific sanctions for PSBB violators, only general sanctions. So that in this case the criteria from minor to serious violations have the same legal consequences. Given the meaning of PSBB and Health Quarantine have different meanings. (2) The level of public discipline in implementing Government policies is still very low, so the role of the Police is needed in making persuasive efforts that are not only an appeal to the public, but as a strategic effective social communication so that it can be accepted by all people.

Keywords: Criminal Sanctions, PSBB, Health Quarantine, Law enforcement